

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Wilayah Provinsi Sumatera Barat terdiri dari lautan dan daratan. Sumatera Barat didominasi oleh wilayah pesisir dan laut. Luas Provinsi Sumatera Barat adalah 42.297,30 km<sup>2</sup>. Luas perairan Sumatera Barat yaitu 186.580 km<sup>2</sup> serta panjang garis pantainya sekitar 2.285,96 km.<sup>1</sup> Sebagai daerah dengan luas laut yang besar, ekonomi penduduk, terutama masyarakat nelayan di daerah pesisir, sangat bergantung pada hasil laut. Kekayaan laut yang melimpah menjadi fokus utama mata pencaharian bagi mereka. Salah satu contohnya adalah Tiku, yang terletak di Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang dikenal dengan usaha kelautannya.

Kecamatan Tanjung Mutiara merupakan satu-satunya di wilayah Kabupaten Agam yang memiliki potensi dan pembangunannya pada sektor laut. Secara letak geografis, Kecamatan Tanjung Mutiara berada di 100°22' Bujur Timur dan 0°03' Lintang Selatan dengan ketinggian sekitar 2 meter di atas permukaan laut. Tanjung Mutiara memiliki luas wilayah 205, 73 km<sup>2</sup> atau sekitar 9,22% dari luas total Kabupaten Agam.<sup>2</sup> Wilayah pesisir ini terdapat banyak

---

<sup>1</sup> Bambang Istijono, "Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pantai Terpadu Studi Kasus Sumatera Barat", (Palembang Sumatera Selatan, 2009).

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Tanjung Mutiara Dalam Angka 2005*, (Lubuk Basung: Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam, 2006), hlm. 1.

sekali sumber daya alam yang meliputi unsur hayati dan non-hayati di dalamnya.

Banyak dari masyarakat Tiku memiliki mata pencarian yang bersumber dari laut, hal ini dikarenakan letak nagarnya berada di pesisir laut. Banyaknya potensi pada hasil kelautan, menjadikan Tiku membutuhkan tempat untuk mendukung segala kegiatan kelautan tersebut. Salah satu fasilitas yang membantu kegiatan nelayan Tiku adalah adanya tempat pendaratan ikan yang biasa disebut Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tiku. Pada dasarnya pengelolaan Pelabuhan Perikanan/Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) adalah bagaimana agar dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat pengguna pelabuhan perikanan dan suasana kondusif sesuai dengan fungsi pelabuhan perikanan itu sendiri. Guna memberikan pelayanan yang baik, pengelolaan pangkalan pendaratan ikan dituntut agar dapat mempersiapkan fasilitas kebutuhan.<sup>3</sup>

Bandar Tiku sekitar abad ke-17-an merupakan bandar yang memiliki fungsi sebagai tempat pengumpul barang komoditi yang dibawa oleh kapal dari bandar lain di sekitar pantai barat Sumatera. Selanjutnya barang komoditi tersebut didistribusikan ke bandar atau ke nagari yang lain. Bandar dan pasar Tiku adalah pusat kegiatan utama di pantai barat Sumatera pada masa lalu. Namun memasuki sekitar abad ke-18 kejayaan bandar Tiku mulai mengalami kemerosotan.<sup>4</sup> Terdapat banyak perubahan pada bandar Tiku, kini bandar Tiku dijadikan sebagai tempat pemukiman nelayan, usaha penangkapan ikan, penjualan ikan dan tempat bersandarnya kapal-kapal para nelayan yang berlabuh.

---

<sup>3</sup> PIPP, *Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan*, <https://dkp.sumbarprov.go.id/home/pages/11> diakses pada 5 Desember 2023.

<sup>4</sup> Mhd. Nur, "Bandar Sibolga di Pantai Barat Sumatera Pada Abad ke-19 Sampai Pertengahan Abad ke-20", *Disertasi* PPS Universitas Indonesia, 2000, hlm. 20.

Bandar Tiku yang sebelumnya berperan sebagai tempat pengumpulan berbagai komoditas yang dibawa oleh kapal dari bandar. Namun, kini sudah berubah fungsi menjadi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tiku. Di beberapa wilayah di Sumatera Barat, terdapat sekitar 27 unit Pangkalan Ikan (PPI) yang dilengkapi dengan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di dalamnya.<sup>5</sup> Salah satunya adalah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang terletak di Tiku, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Tiku merupakan satu-satunya tempat kegiatan lambat labuh perahu/kapal perikanan untuk mendaratkan hasil tangkapan atau melakukan persiapan untuk melaut yang ada di daerah Tiku.

Sebelum menjadi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) jauh sebelumnya hanyalah sebagai Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Kini Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tiku merupakan salah satu dari banyaknya fasilitas yang tersedia di Pangkalan Pendaratan Ikan (TPI) Tiku. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tiku sudah sudah beroperasi sejak tahun 1970-an namun dilakukan pembenahan pertama pada tahun 1978. Perbaikan Tempat Pelelangan (TPI) ini dimulai dari pembangunan infrastruktur pelayanan perikanan di wilayah tersebut, dan dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Agam. Pada awal kehadirannya, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah satu-satunya sarana yang tersedia untuk mendukung kegiatan perikanan masyarakat nelayan di Tiku.

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan melalui proses pelelangan. Proses penjualan

---

<sup>5</sup> Sawitri Ella, Isnaniah, dan Jonny Zain, "Studi Pemanfaatan Fasilitas Dasar Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Gaung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat", *Jurnal Ilmu Perairan* Vol. 10 No. 2/2022, hlm. 91.

ikan dilakukan di hadapan umum dengan cara penawaran yang bertingkat. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan suatu wadah tempat berlangsungnya penjualan hasil penangkapan ikan dari laut atau perairan lain yang dilakukan di hadapan orang banyak.<sup>6</sup> Tempat Pelelangan Ikan (TPI) juga menyalurkan dan mengkoordinir sistem penjualan ikan hasil tangkapan nelayan kepada pembeli dengan sistem lelang.

Adanya Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) akan berpengaruh amat besar terhadap pendapatan nelayan mengingat sifat hasil perikanan yang mudah rusak. Jika kualitas hasil laut menurun akibat sistem pemasaran yang kurang baik, maka harga jualnya akan turun sehingga pendapatan nelayan berkurang. Jika sudah tidak segar, tengkulak tidak mau membelinya sehingga ikan tidak laku. Oleh karena itu Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) berupaya menanggulangi permasalahan nelayan mengenai hal tersebut sehingga keberadaan fasilitas-fasilitas yang ada di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) mampu meningkatkan kualitas fisik ikan dan harga bagi pendapatan nelayan.<sup>7</sup>

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tiku yang awalnya dikenal sebagai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sudah beroperasi selama kurang lebih 46 tahun, dan menjadi satu-satunya tempat kegiatan perikanan yang ada di Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Di Tiku, terdapat 2 (dua) Nagari yang memiliki wilayah perairan yakni Nagari Tiku V Jorong dan

---

<sup>6</sup> Juniardi Hermawan, "Kajian Faktor Tidak Optimalnya Pengelolaan TPI di Muara Angke Jakarta Utara", *Jurnal Prosiding Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 7 No. 1/202, hlm. 44.

<sup>7</sup> Irvan Noor Satrio, *Peran Keberadaan Tempat Pelelangan Ikan Terhadap Pendapatan Nelayan di Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap*, <https://media.neliti.com/media/publications/223024-peran-keberadaan-tempat-pelelangan-ikan.pdf> diakses pada 5 Desember 2023.



Nagari Tiku Selatan. Meskipun demikian, kegiatan perikanan masyarakat hanya dilakukan di Nagari Tiku Selatan. Hal ini disebabkan oleh letak pelabuhannya yaitu Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang berada di Nagari Tiku Selatan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, pengelola Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) mendapatkan arahan dan bimbingan dari pihak Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tiku di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat. Semua biaya pembangunan fasilitas hingga operasional Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat. Selain itu, sumber modal yang didapat Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tiku juga bersumber dari retribusi, yaitu setiap nelayan yang membawa hasil tangkapan dan menggunakan fasilitas yang disediakan membayar biaya retribusi.

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tiku juga sempat mengalami kemerosotan terutama pada tahun 1998, ketika Pemerintah menerapkan Peraturan Pemerintah No 22 tahun 1997 mengenai larangan pengambilan retribusi pajak tangkapan dan larangan pungutan liar terhadap nelayan.<sup>8</sup> Kebijakan ini mengakibatkan menurunnya aktivitas di TPI Tiku karena tidak ada petugas yang bersedia melayani proses pelelangan ikan. Akibatnya, nelayan tidak lagi menjual hasil tangkapan mereka melalui TPI, yang menyebabkan penurunan dalam jumlah kunjungan dan transaksi di tempat tersebut. Selain itu kantor TPI pun menjadi sunyi dan minim aktivitas, mencerminkan dampak langsung dari kebijakan pemerintah yang diberlakukan pada waktu itu.

---

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 22 Tahun 1997, Tentang Jenis Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Kondisi tersebut membuat sistem penjualan ikan menjadi tidak menentu. Mayoritas nelayan langsung menjualkan hasil tangkapan mereka kepada pengecer. Para pengecer sering kali menunggu di tepi pantai atau langsung mendatangi kapal-kapal yang baru merapat ke daratan setelah nelayan membongkar hasil tangkapan mereka. Setelah membeli ikan langsung dari nelayan, pengecer menjualnya dengan menggunakan motor berkeranjang dan mengelilingi wilayah sekitaran Tiku. Selain itu nelayan juga langsung menjualkan hasil tangkap mereka kepada agen atau pedagang yang lebih besar. Nelayan akan langsung mencari dan menjualkan hasil tangkapan mereka kepada agen-agen tersebut.

Beruntung, penurunan yang dialami oleh Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tiku tidak berlangsung lama. Pada tahun 2001, TPI Tiku berhasil kembali aktif beroperasi setelah menerima bantuan Sosial Mikro dari pemerintah. Langkah yang diambil meliputi perbaikan fasilitas serta pembangunan pabrik es pertama di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tiku, bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan. Kemudian keamanan pantai juga mulai beroperasi untuk menjaga nelayan yang melaut dan juga menjaga terumbu karang terhindar dari kerusakan. Pemerintah Agama melalui Dinas Kelautan dan Perikanan telah fokus terhadap kehidupan nelayan dan telah melakukan berbagai kegiatan.<sup>9</sup>

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tiku merupakan program pemerintah sebagai bentuk upaya percepatan pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat khususnya nelayan. Adanya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Tiku tidak hanya akan menguntungkan nelayan, namun juga memberikan

---

<sup>9</sup> "Perhatian Lebih untuk Nelayan", dalam *Padang Ekspres*, Jumat, 12 Desember 2008, hlm, 28.

dampak positif lainnya. Dibangunnya Tempat pelelangan Ikan (TPI) di Tiku menjadikan nelayan memiliki tempat yang dijadikan sebagai pusat pasar transaksi jual beli ikan. Berdasarkan Keputusan Bersama 3 Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor: 139 Tahun 1997; 902/Kpts/PL.420.9/97; 03/SKB/M/IX/1997 tertanggal 12 September 1997 tentang penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, mendefinisikan bahwa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan suatu tempat bertemunya penjual dan calon pembeli yang melakukan transaksi jual beli ikan melalui pelelangan dimana proses penjualan ikan dilakukan di hadapan umum dengan cara penawaran yang bertingkat, kemudian nanti akan didapatkan harga yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.<sup>10</sup>

Keberadaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Tiku memberikan bantuan khususnya untuk penunjang bagi nelayan dengan menyediakan berbagai fasilitas umum seperti tempat pendaratan ikan dan aula untuk tempat penjualan hasil tangkap nelayan yaitu TPI. Adanya fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Tiku dapat menjalinkan hubungan antara penjual dan pembeli secara langsung, sehingga nelayan mendapat harga ikan yang relatif sesuai dengan hasil pendapatan. Keberadaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Tiku dapat mengkoordinir kegiatan nelayan khususnya pada kegiatan penjualan hasil tangkap laut. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Tiku sampai saat ini telah banyak memberikan bantuan terhadap kehidupan masyarakat nelayan. Selain itu juga adanya Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Tiku membantu meningkatkan

---

<sup>10</sup> Keputusan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor : 139 Tahun 1997; 902/Kpts/PL.420/9/97; 03/SKB/M/IX/1997 Tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan.

perekonomian masyarakat nelayan. Secara tidak langsung hal tersebut akan turut mendorong kemajuan secara keseluruhan. Nelayan Tiku juga memerlukan fasilitas seperti Tempat Pelelangan Ikan (TPI) untuk mengkoordinir aktivitas penjualan hasil tangkap mereka agar dan agar lebih terarah.

Perubahan dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) menjadi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Tiku menunjukkan perubahan dalam cara pengelolaan dan distribusi hasil perikanan. TPI adalah tempat di mana ikan dilelang langsung, sementara PPI adalah fasilitas yang lebih modern dan terintegrasi yang tidak hanya menangani pelelangan, tetapi juga pendaratan, pengelolaan, dan distribusi ikan. Penulisan ini menarik karena tidak hanya memetakan perubahan dalam infrastruktur perikanan, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana perubahan memengaruhi efisiensi, kualitas produk, dan dampaknya terhadap masyarakat lokal khususnya nelayan.

## **B. Batasan Masalah**

Penelitian ini terdiri dari batasan spasial dan temporal. Batasan spasial dalam kajian ini adalah Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung, Mutiara Kabupaten Agam. Sedangkan batasan temporal tahun 1978-2018. Pada tahun 1978 merupakan tahun dimana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tiku sebelum berubah menjadi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tiku melakukan pembenahan untuk pertama kalinya. Batasan akhir tahun 2018 karena pada tahun tersebut Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tiku resmi dialihkan dari yang dulunya di bawah Pemerintah Kabupaten/Kota ke Provinsi Sumatera Barat. Hal ini berdasarkan



Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mana kewenangan Pelabuhan Perikanan yang pada mulanya berada di bawah Pemerintah Kabupaten/Kota beralih ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan kemudian ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No. 109 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Struktur Organisasi UPTD Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

Permasalahan yang dibahas dalam kajian ini disusun dalam bentuk pertanyaan dibawah ini:

1. Apa yang melatarbelakangi pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Tiku?
2. Bagaimana Perkembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tiku yang kemudian menjadi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tiku dari tahun 1978-2018?
3. Apa bentuk kontribusi dan dampak keberadaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tiku terhadap nelayan Tiku?

### **C. Tujuan dan manfaat penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan faktor-faktor utama yang mendorong pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Tiku.
2. Menjelaskan bagaimana perkembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tiku yang kemudian mengalami perubahan menjadi Pangkalan

Pendaratan Ikan (PPI) dari tahun 1978 hingga 2018, termasuk perubahan signifikan dalam infrastruktur dan operasi selama periode tersebut.

3. Menjelaskan bentuk kontribusi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tiku terhadap kehidupan dan kegiatan nelayan lokal, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan operasional.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Penelitian ini bertujuan untuk membangun studi relevan yang ada di bidang maritim. Dengan mengutip temuan-temuan sebelumnya, penelitian ini akan memungkinkan adanya perbandingan dan menyoroti pendekatan uniknya dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga mengumpulkan data-data tambahan yang akan memperkuat analisis yang akan disajikan dalam laporan ini. Diantaranya terdapat tinjauan teoritis dan konseptual yang dimuat dalam buku dan penelitian akademik lainnya dan tinjauan penelitian yang berkaitan dengan substansi penelitian.

Buku yang berjudul "*Kebijakan Perikanan dan Kelautan*" ditulis oleh Akhmad Fauzi. Pada buku ini menjelaskan tentang permasalahan perikanan yang memiliki dampak kepada nelayan. Dalam buku ini menggambarkan masalah nelayan pada umumnya yang terbelenggu dari kemiskinan. Masalah-masalah tersebut menjadi pedoman untuk memperlihatkan nelayan di Nagari Sago Salido

bisa keluar dari belenggu kemiskinan.<sup>11</sup> Buku ini membantu penulisan bagaimana bentuk penyelesaian yang terjadi pada pengelola perikanan dan upaya-upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat nelayan.

Buku yang berjudul “*Bandar Sibolga di Pantai Barat Sumatra Pada Abad Ke-19 Sampai Abad Ke-20*” ditulis oleh Dr. Mhd. Nur, M.s. Pada buku ini secara umum melihat peranan bandar dan kebijaksanaan ekonomi yang dijalankan oleh penguasa setempat atau pemerintah kolonial. Selain itu juga ada pendekatan tentang bandar dalam perspektif fungsi bandar sebagai tempat perdagangan, pelayaran dan pintu gerbang keluar bagi pengiriman barang.<sup>12</sup> Pada buku ini banyak membahas bandar Tiku pada abad 19 sampai abad 20 sehingga penulis memahami bagaimana keadaan dan perkembangan bandar Tiku pada masa itu.

Buku yang berjudul “*Dunia maritim Pantai Barat Sumatra*” ditulis oleh Gusti Asnan. Pada buku ini akan menjelaskan pantai barat sumatera yang memiliki dua pengertian. pertama, pantai barat Sumatera dipahami sebagai wujud geografis dari keseluruhan daerah yang terdapat di pesisir barat Pulau Sumatera, mulai dari Lampung di selatan hingga Aceh di utara. Kedua, pantai barat Sumatera dipahami sebagai satu kesatuan daerah administratif. Buku ini menjadikan pengertian yang kedua sebagai pokok bahasanya, dan sekaligus menjadikannya sebagai batasan spasialnya. Namun, berbeda dengan pemahaman dewasa ini, daerah administratif pantai barat. Pada buku ini akan menjawab dua pertanyaan pokok apa arti kehadiran pemerintah kolonial terhadap dunia bahari

---

<sup>11</sup> Akhmad Fauzi, *Kebijakan Perikanan dan Kelautan “Isu, Sintesis dan Gagasan”*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).

<sup>12</sup> Mhd. Nur, *Bandar Sibolga di Pantai Barat Sumatera Pada Abad Ke-19 Sampai Abad Ke-20*, (Padang: Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang, 2015).

daerah ini pada umumnya serta kegiatan perdagangan pada khususnya, dan sejauh mana keterlibatan kelompok-kelompok non pemerintah kolonial dalam kegiatan perdagangan dan pelayanan kawasan ini.<sup>13</sup>

Selanjutnya skripsi dari Sarjulis. “Kehidupan Sosial Ekonomi masyarakat Nelayan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam (1970-2009)”. Dalam skripsi ini membahas mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan dan apa saja bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam kepada nelayan Tanjung Mutiara sehingga bisa menjadi perbandingan masalah kehidupan nelayan di daerah tersebut.<sup>14</sup> Skripsi ini menjadi rujukan tentang kehidupan ekonomi dan bantuan dari pemerintah kepada masyarakat nelayan Tiku Tanjung Mutiara.

Pada Skripsi yang berjudul “Strategi Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam” berisikan analisis tingkat rasio keberadaan dan kebutuhan fasilitas dalam strategi pengembangan aktivitas PPI Tiku Tanjung Mutiara kabupaten Agam, dan juga menganalisa strategi pengembangan pelabuhan perikanan di pangkalan pendaratan ikan (PPI) Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tiku memiliki fasilitas pokok dan fasilitas fungsional yang sangat banyak yang tentunya membantu masyarakat nelayan dalam aktivitas kelautan. Dari banyaknya fasilitas yang ada di Tiku tentu tidak semua berfungsi

---

<sup>13</sup> Gusti Asnan, *Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera*, (Yogyakarta: Ombak, 2007).

<sup>14</sup> Sarjulis, “ Kehidupan Sosial Ekonomi masyarakat Nelayan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam (1970-2009)”, *Skripsi*, (Padang Fakultas Sastra Universitas Andalas, 2011).



dengan baik, maka dari itu pada skripsi ini akan membahas kelayakan fasilitas yang ada di PPI Tiku.<sup>15</sup>

Kemudian artikel yang ditulis dalam jurnal berjudul “Studi Pemanfaatan Fasilitas Fungsional Pangkalan Pendaratan Ikan Tiku Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat”.<sup>16</sup> Artikel ini menjelaskan mengenai jenis, kondisi, keberadaan, dan kapasitas fasilitas pokok Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tiku Kabupaten Agam. Semua informasi yang diuraikan berguna untuk mengetahui kondisi dan tingkat pemanfaatan fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tiku. Dari perhitungan teknis, tingkat pemanfaatan fasilitas menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan lahan adalah 10,24% dengan luas lahan PPI Tiku adalah 2,89 ha. Tingkat pemanfaatan fasilitas dermaga adalah 0% dengan panjang dermaga 150 m lebar 8 m konstruksi tertutup dan dermaga jenis jetty. Tingkat pemanfaatan kedalaman kolam pelabuhan adalah 100% dengan luas 5 ha dan kedalaman kolam yang dibutuhkan yaitu 1,89 m dan kedalaman kolam terpakai 1,30 m. Hasil tersebut menunjukkan kondisi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tiku untuk kedepannya perlu dikembangkan dan melengkapi fasilitas lainnya.

Pada artikel yang ditulis dalam jurnal “Analisis Pendapatan dan Tingkat Kesejahteraan Keluarga Nelayan di Kenagarian Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam” ini berisikan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pendapatan keluarga nelayan di Nagari Tiku V Jorong dan juga mengetahui tingkat kesejahteraan keluarga nelayan. Kemudian dapat

---

<sup>15</sup> Arif Kurniawan, “Strategi Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam”, *Skripsi*, (Padang Universitas Bung Hatta, 2020).

<sup>16</sup> Etika Amalia "Studi Pemanfaatan Fasilitas Pokok Pangkalan Pendaratan Ikan Tiku Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat" *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Perikanan dan Ilmu Kelautan*, Vol 5. No. 1/2018.

disimpulkan bahwa pendapatan keluarga nelayan di Kenagarian Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam berada pada rentang Rp 1.5000.000 – Rp 2.5000.000 yang berada pada kategori sedang. Tingkat kesejahteraan keluarga nelayan di Kenagarian Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara kabupaten Agam berada pada rentang 7-14 dengan kategori belum sejahtera.<sup>17</sup> Tulisan ini membantu penulis dalam mengetahui bagaimana kehidupan nelayan di Tiku V Jorong, tentunya tidak jauh berbeda dengan nelayan yang ada di Tiku Selatan. Sehingga memudahkan penulis dalam menganalisis permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan ekonomi nelayan Tiku.

Pada artikel yang ditulis dalam jurnal dengan judul “Analisis Tingkat Efisiensi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Pematang” ini berisikan identifikasi sarana prasarana, menganalisis tingkat efisiensi serta membandingkan efisiensi Tempat Pelelangan Ikan yang ada di Kabupaten Pematang. Tingkat Efisiensi sebuah Tempat Pelelangan Ikan tidak lepas dari sarana dan prasarana yang mendukung kinerja dari Tempat Pelelangan Ikan. Pemerintah telah mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh tempat pelelangan ikan di dalam keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 52A/ Kepmen-KP/ 2013 Tentang pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan, dan Distribusi di dalam peraturan tersebut terdapat sembilan persyaratan mulai dari kondisi bangunan sampai dengan sarana pendukung kegiatan pelelangan yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan apakah tempat pelelangan tersebut telah efisien atau ada yang perlu diperbaiki.

---

<sup>17</sup> Arif Kesri, "Analisis Pendapatan dan Tingkat Kesejahteraan Keluarga Nelayan di Kenagarian Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam", *Jurnal Buana* Vol. 2. No. 1/2018.

Permasalahan yang ada di TPI Kabupaten Pematang Jaya adalah seperti belum dimanfaatkannya TPI secara optimal, pembayaran oleh bakul yang tidak secara tunai, harga ikan di nelayan lebih rendah dari pada dipasaran, kemudian sarana dan prasarana di beberapa TPI yang kurang memadai.<sup>18</sup> Tulisan ini membantu penulis lebih memahami bagaimana fungsi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang semestinya.

Penelitian jurnal “Sejarah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Tumumpa Kota Manado tahun 1992-2016” ini mengacu pada Sejarah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Tumumpa Kota Manado Tahun 1992-2016.<sup>19</sup> Penelitian ini dijadikan acuan dalam penulisan karena memiliki kesamaan substansial dalam pembahasannya, yaitu fokus pada sejarah lembaga Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Walaupun demikian, terdapat perbedaan signifikan antara penelitian ini dan acuan tersebut, khususnya dalam hal cakupan wilayah yang diteliti. Penelitian ini mengkaji TPI di Tiku secara mendalam, sementara acuan sebelumnya membahas TPI di wilayah Manado. Oleh karena itu, meskipun ada kesamaan dalam topik pembahasan, perbedaan wilayah ini memberikan perspektif yang unik dan relevan untuk pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perkembangan dan dampak TPI di Tiku.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah disampaikan, tulisan-tulisan tersebut mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kemaritiman, kelembagaan, serta kehidupan nelayan, yang dapat dijadikan referensi dalam

---

<sup>18</sup> Belladona Lavictory, “Analisis Tingkat Efisiensi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Pematang Jaya”, *Jurnal Perikanan Tangkap*, Vol. 1, No. 01/2017.

<sup>19</sup> Susanto Lessunaung, “ Sejarah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Tumumpa Kota Manado tahun 1992-2016”, *Skripsi*, (Manado Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sam Ratulangi, 2017).

penulisan kali ini. Di antara tulisan-tulisan tersebut, terdapat yang membahas Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tiku secara mendalam mengenai strategi pengembangan dan pemanfaatan fasilitas yang ada di PPI Tiku. Namun, belum ada studi yang mengkaji secara rinci mengenai Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tiku dengan pendekatan sejarah. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Tiku memiliki peranan signifikan sebagai satu-satunya pusat aktivitas perikanan di Kecamatan Tanjung Mutiara. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai PPI ini menjadi sangat relevan. Penelitian tentang PPI Tiku dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai bagaimana fasilitas ini berkembang dari waktu ke waktu, bagaimana perannya dalam ekonomi lokal, dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan masyarakat nelayan di sekitarnya.

#### **E. Kerangka Analisis**

Indonesia, yang terkenal sebagai negara dengan sebagian besar wilayahnya berupa perairan, tidak dapat dipisahkan dari narasi kemaritiman. Hampir setiap peristiwa dan aktivitas masyarakat terkait dengan air, baik dalam konteks kelautan maupun dalam skala yang lebih luas, mencakup semua jenis perairan yang ada di berbagai daerah. Hubungan antara air dan masyarakat sangat erat, terkait langsung dengan fungsi air dalam menunjang kehidupan.<sup>20</sup> Dari sudut pandang ilmu sosial, khususnya dalam konteks sejarah, laut merupakan sebuah dunia yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Keterhubungan ini telah melahirkan dinamika

---

<sup>20</sup> Ilham Nur utomo, Fanada Sholihah, "Dari Hilir Ke Hulu: Perkembangan Sejarah Maritim Indonesia Dan Selingkar Permasalahannya", *Artikel Megister Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro*, hlm. 16.



kelautan yang kompleks, yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Dinamika ini mencakup berbagai bidang seperti perdagangan yang bergantung pada jalur pelayaran laut, pengembangan perkapalan sebagai sarana transportasi dan eksplorasi, serta tradisi bahari yang menjadi bagian integral dari budaya masyarakat pesisir. Selain itu, laut juga berperan dalam mitologi yang membentuk kepercayaan dan cerita rakyat, mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan politik, serta sektor perikanan yang menjadi sumber utama pangan dan ekonomi bagi banyak komunitas.<sup>21</sup>

Berbicara mengenai laut tentu tidak terlepas dari nelayan dan peran pelabuhan. Nelayan yang dimaksud disini mengacu pada orang yang secara aktif dalam melakukan usaha di bidang penangkapan ikan atau hasil laut lainnya.<sup>22</sup> Nelayan adalah penduduk yang tinggal di pesisir pantai dan sumber kehidupan ekonominya bergantung secara langsung pada kegiatan mengolah sumber daya laut. Komunitas nelayan adalah kelompok orang yang bermata pencaharian hasil laut dan tinggal di desa-desa pantai atau pesisir.<sup>23</sup> Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggiran pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Nelayan merupakan orang yang secara aktif melakukan penangkapan (budidaya) di laut di tempat yang masih dipengaruhi pasang surut, dan bila ada

---

<sup>21</sup> Gusti Asnan, *op. cit*, hlm. 7.

<sup>22</sup> "Nelayan" dalam Ensiklopedia Indonesia, jilid IV, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve), tanpa tahun terbit, hlm. 254.

<sup>23</sup> Sastrawidjaya, dkk, *Nelayan Nusantara*, (Jakarta: Pusat Pengolahan Produk Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 2002).

yang menangkap ikan di tempat budidaya ikan seperti tambak, kolam ikan, danau dan sungai tidak termasuk nelayan.

Nelayan memerlukan pelabuhan sebagai bagian penting dalam aktivitas melaut mereka, menjelaskan bahwa pelabuhan sangat erat kaitannya dengan perikanan, yang dimaksud dengan istilah perikanan adalah pekerjaan atau usaha menangkap ikan baik itu di perairan umum yang sifatnya masih alamiah seperti laut, sungai, danau, rawa, maupun pada perairan terbatas yang merupakan buatan manusia seperti kolam, tambak waduk, yang bertujuan untuk mencukupi sumber daya ikan.<sup>24</sup> Menurut peraturan perundang-undangan tahun No. 9 tahun 1998 tentang perikanan, menjelaskan bahwa perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Sementara itu usaha perikanan dapat diartikan sebagai semua usaha yang dilakukan perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.<sup>25</sup>

Dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan, tentunya nelayan membutuhkan suatu tempat atau sarana yang dapat membantu mereka, yaitu Tempat Pelelangan Ikan (TPI), merupakan sebuah tempat atau fasilitas yang biasanya terletak di dalam pelabuhan atau pangkalan pendaratan ikan dan terjadi transaksi penjualan ikan dan hasil laut oleh nelayan baik secara lelang maupun tidak dan dikoordinasikan oleh Dinas Perikanan, Koperasi atau Pemerintah

---

<sup>24</sup> Syofianda Aldian, "Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus", *Skripsi* (Fakultas Ilmu Budaya Prodi Ilmu Sejarah, 2013), hlm. 14.

<sup>25</sup> Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perikanan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1985", (Padang: Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Sumatera Barat), hlm. 2.

daerah.<sup>26</sup> Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Tiku merupakan salah satu bagian dari Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tiku. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tiku merupakan sebuah lembaga yang bergerak di bidang perikanan. Lembaga adalah badan/organisasi yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau merupakan suatu usaha.<sup>27</sup> Lembaga adalah aturan di dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang yang memfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk membantu mereka dengan harapan di mana setiap orang dapat bekerja sama atau berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan.<sup>28</sup> Kelembagaan diidentikkan dengan aturan sebagai panduan yang dipakai oleh para anggota suatu suatu kelompok masyarakat untuk mengatur hubungan yang saling mengikat atau saling tergantung sama lain.

Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Sebuah organisasi dapat dibentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Organisasi yang dianggap baik adalah organisasi yang dapat diakui keberadaannya oleh masyarakat disekitarnya, karena memberikan kontribusi seperti pengambilan sumber daya manusia dalam masyarakat sebagai anggota-anggotanya sehingga menekan angka

---

<sup>26</sup> Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2007), hlm. 510.

<sup>27</sup> Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 81.

<sup>28</sup> Ruttan. Hayani, "Toward a Theory of Induced Institutional Innovation", *Jurnal of Development Studies* Vol. 20, 1984, hlm. 44.

pengangguran.<sup>29</sup> Organisasi atau lembaga tersebut adalah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tiku.

## **F. Metode dan Bahan Sumber**

Sebagai ilmu, sejarah memiliki sifat ilmiah yang mendalam. Proses penelitian dalam sejarah dikenal dengan istilah metode sejarah, yang berfungsi sebagai kerangka sistematis yang dirancang untuk mengoptimalkan pencarian dan penggunaan sumber-sumber sejarah. Metode sejarah tidak hanya bertujuan untuk menemukan dan mengumpulkan informasi, tetapi juga untuk menerapkan kritik yang cermat serta melakukan penilaian sintesis terhadap data yang diperoleh. Langkah-langkah ini kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan yang berfokus pada penyajian generalisasi untuk mencapai hasil yang informatif dan akurat. Metode yang dilakukan dalam penulisan sejarah meliputi empat tahap yaitu Heuristik, kritik, Interpretasi, dan Historiografi.<sup>30</sup>

Heuristik, pengumpulan sumber yaitu proses pencarian dan pengumpulan sumber-sumber sejarah baik yang tertulis dan tidak tertulis. Beberapa data tertulis seperti arsip, koran, peta, undang-undang, dan dokumen lainnya terkait dengan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tiku. Pengumpulan data dan sumber juga dilakukan melalui studi kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian. Studi kepustakaan ini diperoleh dari perpustakaan Jurusan Sejarah FIB Unand dan

---

<sup>29</sup> Nasution S, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, (Bandung: Jemmars, 1983), hlm. 25.

<sup>30</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Yogyakarta Bentang Budaya, 1999), hlm. 69.



Perpustakaan pusat Universitas Andalas. Selain itu juga dilakukan wawancara dengan masyarakat Tiku seperti nelayan, kepala UPTD PP Wilayah II, dan pengurus Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Tiku dll.

Tahap kedua adalah kritik sumber. Kritik sumber juga terbagi menjadi dua yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal adalah menegakkan kembali teks yang benar, menerapkan dimana, kapan dan oleh siapa dokumen itu ditulis dan juga mengklasifikasikan dokumen ini menurut sistem dan kategori-kategori yang diatur sebelumnya. Kritik internal merupakan suatu analisis atas isi dokumen dan suatu pengujian mengenai apa yang dimaksudkan oleh penulis.<sup>31</sup>

Tahap ketiga adalah interpretasi data, Interpretasi yaitu menafsirkan hubungan antara sumber dan data yang didapatkan sebelumnya agar mudah dipahami. Dengan menafsirkan dan menganalisis fakta-fakta sejarah dari sumber dan data akan membantu peneliti dalam memberikan relasi antar fakta-fakta. Pada intinya tahap interpretasi merupakan merangkai atau menyusun fakta hingga menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan dan juga masuk akal.

Tahap terakhir yaitu historiografi, merupakan proses penyusunan fakta-fakta sejarah dan berbagai sumber yang telah diseleksi dalam sebuah karya ilmiah.<sup>32</sup> Metode penelitian diarahkan kepada penulisan sejarah prosesual yang menggambarkan sejarah sebagai proses, yang mencakup uraian naratif atau cerita. Penulisan ini harus didukung oleh daya imajinasi yang kuat dari sejarawan, hal ini terkait dengan kemampuan merangkai kata-kata, sehingga terjalin hubungan

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 77.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 80.

antara fakta. Pada tahap ini merupakan penulisan karya ilmiah yang mencakup narasi sejarah, analisis, interpretasi dan kesimpulan.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini terdiri dari beberapa bab yang secara berturut-turut menjelaskan tentang masalah-masalah yang terdapat dalam penelitian ini. Dalam masing-masing bab tergambar secara jelas mengenai masalah yang diterangkan dan mempunyai keterkaitan yang erat sehingga dapat dianalisis sesuai dengan data-data yang telah dihimpun.

Pada bab I berisikan pendahuluan untuk pembahasan masalah. Pada bagian ini berisi latar belakang masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka analisis, metode dan bahan sumber dan sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan potensi laut yang dimiliki oleh Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara, sehingga adanya peluang dan pendirian Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tiku sebagai fasilitas pertama dari Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

Bab III akan membahas Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tiku. Pada bab ini dijelaskan bagaimana pengelolaan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tiku dari segi kepengurusan dan pemanfaatan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Begitu juga kebijakan yang ada di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tiku.

Bab IV membahas tentang dampak yang dirasakan oleh masyarakat setelah kehadiran Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Tiku kepada masyarakat terutama nelayan.

Bab V merupakan bagian terakhir yang berisikan kesimpulan. Pada kesimpulan akan menyimpulkan secara ringkas pembahasan dan permasalahan mengenai Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Tiku.

